



KR-Antara/Maulana Surya

PENGELOLAAN SAMPAH SOLO: Petugas mengendarai motor untuk membuang sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo, Mojosongo, Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/5). Pemkot Solo membuka peluang kerja sama pengelolaan sampah dengan wilayah Soloraya dan daerah lainnya termasuk DIY, menyusul akan beroperasinya PLTSa Putri Cempo pada akhir tahun 2022 yang membutuhkan bahan baku sampah untuk pembangkit listrik tersebut.

KEMENKES UNGKAP

Penderita Hipertensi Terus Meningkat

JAKARTA (KR) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyampaikan bahwa penderita hipertensi sebagai salah satu penyakit tidak menular (PTM) terus meningkat di Indonesia.

"Prevalensi hipertensi terus meningkat dari tahun ke tahun. Hipertensi di Indonesia sebesar 34,1 persen tahun 2018, dengan prevalensi tertinggi di Kalimantan Selatan sebesar 44,3 persen dan terendah di Provinsi Papua sebesar 22,2 persen," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kemenkes Elvieda Sariwati dalam Peringatan Hari Hipertensi Dunia yang diikuti di Jakarta, Kamis (12/5).

Elvieda Sariwati mengungkapkan,

berdasarkan hasil survei hanya tiga dari 10 penderita penyakit tidak menular yang terdeteksi, selebihnya tidak mengetahui bahwa dirinya sakit. "Hal itu karena penyakit tidak menular tidak ada gejala dan tanda sampai terjadi komplikasi," tuturnya.

Kondisi itu, lanjutnya, menyebabkan pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi teridentifikasi memiliki penyakit jantung dan lainnya. Dari tiga penderita penyakit tidak menular yang terdeteksi tersebut, ia menambahkan,

hanya satu orang yang berobat teratur.

Menurut Elvieda, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kemenkes 2018 menunjukkan sebesar 8,8 persen penderita hipertensi yang terdiagnosis dan hanya 50 persen yang minum obat secara teratur.

Ia menyampaikan, hal itu didukung data Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) tahun 2022, penderita hipertensi yang berobat secara teratur sebesar 27,5 persen. "Alasan tidak minum obat teratur adalah karena merasa sehat, hipertensi memang tidak bergejala, kalau dibiarkan saja lama-lama bisa terjadi komplikasi, yakni bisa stroke, jantung dan lainnya," tuturnya.

Ketua Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia Erwinanto mengatakan, penyakit yang berhubungan dengan hipertensi di tingkat masyarakat cukup menghabiskan biaya penyakit kataris tropik yang besar. "Itu harus dihindari dengan cara menurunkan tekanan darah pada pasien yang sudah hipertensi," ujarnya.

Ia memaparkan, salah satu cara mengendalikan tekanan darah bagi yang sudah hipertensi yakni dengan mengubah gaya hidup sehat dengan atau tanpa terapi obat.

"Batasi garam sedapat mungkin, kurangi konsumsi alkohol. Lalu olahraga teratur minimal 30 menit perhari dan sedapat mungkin tiap hari," tuturnya.

(Ant/San)-f

MENKO PMK:

Indonesia Sudah Menuju Endemi

JAKARTA (KR) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, Indonesia sudah mulai melakukan transisi dari pandemi menuju fase endemi. Hal itu didasari beberapa indikator dan dari data-data yang ada. "Intinya pokoknya dilihat dari angka kasus aktif, positivity rate, tingkat okupansi rumah sakit, kemudian angka kematian sekarang sudah ada tanda-tanda bukan tertinggi dari penyakit yang ada," ujar Menko PMK di Kantor Wapres, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (12/5).

Muhadjir menyatakan, berdasarkan survey internal yang dilakukan Kemenko PMK di 18 rumah sakit di DKI Jakarta pada Februari 2022, saat ini angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia telah turun di peringkat ke-14. "Yang paling tinggi kematian itu kanker, kemudian pneumonia, peneumonia nonspesifik, dan sekarang Covid-19 yang meninggal sudah di ranking 14. Jadi sudah bukan lagi ancaman," ucapnya.

Meskipun memang kasus Covid-19 sudah semakin membaik, Menko PMK meminta masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati. Mengingat kasus meninggal dan yang terjangkau juga masih ada.

"Tetapi dilihat dari beberapa indikator itu kita sebetulnya de facto (secara fakta) sudah menuju ke endemi," imbuhnya.

(Ati)-f

DIEVALUASI TIAP 3 BULAN

5 Pejabat Gubernur Dilantik

JAKARTA (KR) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik lima pejabat gubernur untuk menggantikan kepala daerah yang masa jabatannya habis, Kamis (12/5) di Jakarta. "Sesuai Undang-Undang, kekosongan diisi oleh pejabat, syaratnya Pejabat Tinggi Madya setara Eselon 1," kata Tito Karnavian.

Lima pejabat yang dilantik yakni Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat, Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten, dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Mendagri Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat.

Selain itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Jamaludin sebagai Pj Gubernur Bangka Belitung, dan Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Hamka Hendra Noer sebagai Pj Gubernur Gorontalo.

Tito mengatakan, pemilihan penja-

bat gubernur tersebut telah sesuai aturan yang berlaku, yakni UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. "Sesuai UU juga jabatan pejabat berlangsung paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang dengan orang yang sama atau orang yang berbeda," ujarnya.

Penjabat gubernur di tahun berikutnya akan ditentukan setelah melihat hasil evaluasi dari penjabat yang ditunjuk saat ini. Mendagri mengingatkan seluruh penjabat gubernur melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, menjalin komunikasi dengan Pemerintah Pusat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota dan masyarakat.

Menurut Mendagri, penjabat gubernur yang telah dilantik akan dievaluasi kinerja mereka setiap tiga bulan. "Tiga bulan sekali, sesuai UU para penjabat ini harus membuat laporan pelaksanaan tugas dan kemudian dari situ kita bisa melakukan evaluasi apakah performanya bagus atau tidak," kata Mendagri.

Kemudian, lanjutnya, dalam waktu satu tahun masa jabatan, para penjabat yang telah ditunjuk bisa diperpanjang dengan orang yang sama atau bisa juga diganti dengan orang yang berbeda, tergantung bagaimana kinerja performa mereka.

Mendagri mengatakan, Presiden telah mengamanatkan agar para penjabat bekerja dengan profesional. "Termasuk mendukung Program-program Strategis Nasional dan permasalahan-permasalahan lokal yang ada di daerah masing-masing menjadi prioritas betul-betul bisa diselesaikan," ucapnya.

Mendagri mengatakan, kelima penjabat terpilih sudah melalui mekanisme yang telah diatur. Para penjabat sebelum dipilih juga sudah melewati penjurangan dan masukan dari kementerian/lembaga dan tokoh masyarakat. "Seperti Paulus Waterpauw merupakan usulan dari Majelis Rakyat Papua Barat dan beberapa tokoh yang lain. Kemudian juga dari kementerian lain, masukan Kementerian ESDM, Kemenpora, ada juga mendengarkan aspirasi lokal seperti Sekda," ujarnya.

(Ant/San)-f

KPK SOAL PENJABAT KEPALA DAERAH

Harus Miliki Kapasitas dan Integritas Tinggi

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan penjabat kepala daerah memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas tinggi. "Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih demi memajukan daerah yang dipimpinnya," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding melalui keterangannya di Jakarta, Kamis (12/5).

Sejak awal, kata Ipi Maryati, KPK mengantarkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penunjukan penjabat kepala daerah untuk menghindari potensi korupsi, praktik transaksional, maupun kepentingan politik demi mendapatkan calon penjabat yang berkualitas dan memenuhi kriteria.

"Pentingnya integritas yang mumpuni juga mengingat bahwa para penjabat kepala daerah memiliki kewenangan yang sama dengan kepala daerah definitif dan mereka akan memimpin daerah dalam waktu yang relatif cukup lama sekitar satu hingga dua tahun," kata Ipi.

Sebagai penjabat kepala daerah, kata Ipi, tentu akan menerbitkan dan menjalankan sejumlah kebijakan strategis yang berdampak pada jalannya pemerintahan

dan kesejahteraan masyarakat.

"Penjabat kepala daerah di antaranya memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengajukan APBD, APBD Perubahan, hingga pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Selain itu, juga mengelola sektor belanja daerah dengan melakukan pengadaan barang dan jasa," tuturnya.

Sebagaimana data penanganan perkara KPK menunjukkan hingga Desember 2021, KPK telah menangani 170 perkara kepala daerah yang terdiri 148 perkara bupati/walikota dan 22 perkara gubernur.

Ipi mengungkapkan, titik rawan korupsi dalam pemerintahan daerah dan juga menjadi modus korupsi kepala daerah tersebut, yaitu terkait dengan belanja daerah yang meliputi pengadaan barang dan jasa, pengelolaan kas daerah, hibah dan bantuan sosial (bansos), pengelolaan aset, hingga penempatan modal Pemda di BUMD atau pihak ketiga.

Berikutnya, korupsi pada sektor penerimaan daerah mulai dari pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan daerah dari pusat, korupsi di sektor perizinan mulai dari pemberian rekomendasi hingga penerbitan perizinan dan benturan kepentingan.

(Ant/San)-f

IMPLEMENTASI DBON

Daerah Wajib Sediakan Sarana Olahraga

JAKARTA (KR) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, penyediaan sarana olahraga akan menjadi program wajib para kepala daerah. "Dalam rapat tadi Bapak Wapres menyarankan untuk menjadi program wajib. Dengan program wajib, maka otomatis anggaran dibuat programnya, dan itu akan meliputi pembangunan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan olahraga di sekolah-sekolah, pembuatan event-event olahraga dan lain-lain," kata Mendagri di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/5).

Mendagri menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri Rapat Pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Olahraga saat ini termasuk satu dari 18 urusan pilihan. Jadi karena tidak menjadi wajib, maka kita sangat tertinggal passion kepala daerah masing-masing. Kepala daerah-

nya suka olahraga, ya mengembangkan olahraga, jadi program yang diutamakan, masuk prioritas, anggarannya pun jadi besar, prasarana dan sarannya dibangun," katanya.

Namun, kata Mendagri, dengan beragamnya karakter masyarakat, budaya, geografi Indonesia, maka program-program olahraga unggulan harus sesuai dengan karakter sosial dan budaya masyarakat. "Misalnya daerah-daerah pegunungan di Papua itu, mereka memiliki gen yang terbentuk ribuan tahun karena ketinggian, udara tipis, oksigen tipis, jantungnya lebih tebal. Nah sebetulnya kita punya potensi itu. Paralayang misalnya atau daerah-daerah perairan, laut, diving, olahraga air, sedangkan yang di urban, seperti Jakarta, misalnya olahraga ketangkasan," ujar Tito.

Dengan desain yang disesuaikan kondisi geografis masing-masing daerah, Tito menyebut para kepala da-

erah bisa lebih fokus. "Tapi tidak mengunci mereka pada cabang itu saja, cabang lainnya kalau mau dikembangkan bisa dikembangkan. Dengan demikian adanya program anggaran yang diwajibkan otomatis daerah bisa melahirkan atlet-atlet yang bisa bertanding di tataran nasional dan internasional," ucap Tito.

Berdasarkan Perpres No 86 Tahun 2021 tentang DBON, Wapres Ma'ruf Amin menjadi Ketua Tim Koordinasi Pusat Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). DBON menjadi rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi dan industri olahraga.

DBON meliputi olahraga rekreasi, pendidikan, prestasi dan industri olahraga.

(Ant/San)-f



KR-Antara/Yusuf Nugroho/foc

PENCEGAHAN WABAH PMK: Dokter hewan memeriksa kesehatan hewan sapi di tempat peternakan, Desa Garung Lor, Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah, Kamis (12/5). Pemeriksaan dari Dinas Pertanian dan Pangan (Disperpan) setempat ke sejumlah peternak sapi dan kambing itu guna mencegah penyebaran wabah virus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak yang sudah merebak di sejumlah daerah.